

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor kebijakan renstra yang saling berintegrasi satu dengan lainnya. Oleh karena itu suatu Kewajiban Perangkat Daerah (PD) dalam mewujudkan Visi, Misi, Program dan kemudian ditindaklanjuti pada Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD).

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan Satuan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai perangkat otonomi daerah yang mempunyai visi dan misi sesuai kompetensi yang dimiliki serta koheren dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melaksanakan visi dan misi sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana kerja (Renja) yang dilaksanakan pada setiap tahunnya dalam rangka mengukur kinerja Organisasi dan sebagai tindak lanjut penjabaran dari Rencana Strategis Jangka Menengah (Lima Tahunan) yang capaian kinerjanya diukur setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja PD ditindak lanjut dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya dan selanjutnya diproses dalam penyusunan RAPBD.

Target kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2022 ini, menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja unit satuan kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran kinerja/keberhasilan unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kinerja.

Sedangkan Rencana Kinerja pada Tahun 2022 bagi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan komitmen dan kontrak kerja yang harus dioptimalkan dalam proses pencapaian kinerjanya, sebagai bagian dari upaya pencapaian target kinerja, Rencana Strategis serta visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada Umumnya.

Dalam perkembangannya rencana kinerja yang telah disusun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

I.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) khususnya lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 24 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada setiap Perangkat Daerah (PD), dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I P E N D A H U L U A N

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021 sebagai bahan pembandingan pada pelaksanaan Renja tahun 2020, dimana pada tahun 2020 pelaksanaan Renja PD capaian prosentasenya sekitar **96,75** persen dan berdasarkan realisasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencapaian yang tidak optimal atau serapan anggaran belum maksimal. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seyogyanya ditempuh langkah-langkah strategis yakni dengan memberikan arahan dan petunjuk serta memotivasi SDM agar dapat memacu serapan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan.

Disamping itu adanya penyesuaian program berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat meningkatkan capaian prosentase pelaksanaan Renja PD pada tahun 2022. Sebagai bahan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASILPELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI S.D. TAHUN 2020
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target capaian kinerja Program (Renstra SKPD) s.d. Tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan s.d. triwulan II tahun 2021 | | | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s.d. tahun berjalan (2021) | |
|----------|--|---|---|--|---|--------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. tahun berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8=(7/6)</i> | <i>9</i> | <i>10</i> |
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian | 57,2 | 50 | 57 | 55 | 96,5% | | 44,80% |
| | Kegiatan :Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase koperasi yang diawasi | 43,00 | 40 | 42,00 | 6,2 | 14,8% | 50 | 116,3% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|------|--------|----|-------|-----|---------|
| | SUB KEGIATAN Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang diawasi | 43,00 | 39 | 41,00 | 23 | 56,1% | 610 | 1418,6% |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi berkualitas | 8,2 | 7,8 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 12,2% |
| | Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang dilatih | 11,00 | 0 | - | 0 | 0,0% | 3 | 27,3% |
| | Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi | 120,00 | 0 | - | 0 | 0,0% | 85 | 70,8% |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan | 75,2 | 74,8 | 75 | 0 | 0,0% | 24 | 31,9% |
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan | 24,00 | 0 | 14,00 | 0 | 0,0% | 22 | 91,7% |
| | Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Data akurat UMKM yang terwujud | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0,0% | 20 | 2000% |
| | Sub kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah wirausaha pemula yang tercipta | 100,00 | 50 | 100,00 | 0 | 0,0% | 15 | 15% |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM | 91,80 | 93 | 92 | 93 | 98,9% | 65 | 71% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-------|--------|-----|-------|---|--------|
| | Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 50,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | 5,00 | 100 | 5,00 | 2 | 40,0% | | 64,80% |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan | 100,00 | 100 | 100,00 | 33 | 33,0% | | |
| | Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase pelaksanaan pelatihan | 47,00 | 40 | 45,00 | 33 | 73,3% | | |
| | Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah pencari kerja yang dilatih | 500,00 | 850 | 386,00 | 165 | 33,0% | 3 | 100% |
| | Sub kegiatan: Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia | 5,00 | 0 | 4,00 | 1 | 25,0% | 1 | 20% |
| | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 68,80 | 68,50 | - | 0 | 0,0% | 5 | 7% |
| | Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Persentase pemanfaatan informasi pasar kerja | 30,00 | 0 | - | 0 | 0,0% | 5 | 17% |
| | Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Banyaknya akses pada informasi pasar kerja online | 700,00 | 0 | - | 0 | 0,0% | 4 | 1% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|-------|----------|------|--------|---|------------|
| | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan | 91,2 | 86,80 | 91 | 88 | 96,7% | | |
| | Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Besaran pemeriksaan perusahaan | 23,00 | 18,5 | 11,00 | 11 | 100,0% | | |
| | Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah perusahaan yang didata | 29,00 | 40 | 22,00 | 22 | 100,0% | - | - |
| | Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga honorer Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0% | | 33% |
| | Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan | 5.067,00 | 4900 | 4.969,00 | 4969 | 100,0% | 1 | 0% |
| | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Satuan permukiman yang dibina | 2,30 | 0 | 1,00 | 0 | 0,0% | | |
| | Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase transmigran yang dibina | 75,30 | 78 | 76,10 | 78 | 97,6% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|------|-------|-----|--------|-------|--------|
| | Sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan | 50,00 | 50 | - | 0 | 0,0% | | |
| | Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | jumlah sarana hunian yang dipersiapkan | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 100,0% | 20 | 667% |
| | Sub kegiatan: Pelatihan Transmigrasi | Jumlah transmigran yang dilatih | 50,00 | 0 | - | 0 | 0% | #REF! | #REF! |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri | 24,70 | 22 | 23,90 | 10 | 41,8% | #REF! | #REF! |
| | Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha | 46,00 | 43 | 44,00 | 22 | 50,0% | | |
| | Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman | Jumlah sarana yang dibantukan | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 50,0% | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 100% | 100% | 50% | 50,0% | 0,00% | 0% |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 50% | 50,0% | 500 | 50000% |
| | Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat | 3 | 3 | 3,00 | 2 | 66,7% | | |
| | Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat | 1 | 1 | 2,00 | 2 | 100,0% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------|--------|--------|-------|-----|-------|
| | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 50,00% | 50,0% | | |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 14,00 | 14 | 14,00 | 8 | 57,1% | 600 | 4286% |
| | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan | 725,00 | 714 | 715,00 | 301 | 42,1% | | |
| | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud | 1,00 | 1 | 1,00 | 0 | 0,0% | 8 | 800% |
| | Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 50% | 50,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan | 35,00 | 0 | 35,00 | 0 | 0,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya | 35,00 | 35 | 35,00 | 15 | 42,9% | | |
| | Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya | 35,00 | 35 | 35,00 | 15 | 42,9% | 0 | 0% |
| | Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 50% | 50,0% | 0 | 0% |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan | 37,00 | 44 | 37,00 | 15 | 40,5% | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 4.752,00 | 0 | - | 0 | 0,0% | | |
| | Sub kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12.500,00 | 0 | - | 0 | 0,0% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|------|--------|-----|--------|--|--|
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | 389,00 | 0 | 389,00 | 0 | 0,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah hidangan tamu yang disediakan | 215,00 | 200 | 215,00 | 43 | 20,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 154,00 | 98 | 105,00 | 93 | 60,4% | | |
| | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | 50% | 50,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | 3,00 | 0 | - | 0 | 0,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan mebel | Jumlah mebel yang diadakan | 10,00 | 0 | - | 0 | 0,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | 4,00 | 0 | 3,00 | 3 | 100,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | 3,00 | 0 | 2,00 | 0 | 0,0% | | |
| | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | 100% | 100% | 50% | 50,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu penyediaan jasa listrik | 12,00 | 12 | 12,00 | 6 | 50,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12,00 | 12 | 12,00 | 6 | 50,0% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|------|-------|-----|-------|--|--|
| | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 30% | 30,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya | 12,00 | 11 | 12,00 | 6 | 50,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 16,00 | 14 | 19,00 | 3 | 15,8% | | |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2,00 | 1 | 1,00 | 0 | 0,0% | | |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara | 15,00 | 15 | 14,00 | 2 | 14,3% | | |

Dari tabel TC 29 di atas terlihat bahwa sebagian besar target belum tercapai sesuai target. Hal ini disebabkan dana yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut tidak dapat disediakan ataupun tersedia namun kegiatan tidak dapat terlaksana akibat pengalokasian kembali dana untuk kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak seperti yang terjadi pada tahun ini dimana wabah covid 19 memaksa pemerintah daerah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk menanggulangnya

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara kelembagaan Perangkat Daerah (PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah. Untuk mengukur Kinerja Pelayanan PD, maka dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode Analisa Lingkungan Strategis, Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diemban oleh lembaga Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan PD, memerlukan :

II.1.1. Lingkungan Strategis

Pengertian Lingkungan Strategis adalah faktor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Organisasi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Lingkungan Strategis dibagi dua yaitu Instrumental Input dan Environmental Input. Environmental Input berkaitan dengan kebijakan atau Political Will dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah melainkan disiasati apabila berbentuk ancaman. Demikian pula dengan lingkungan strategis dianalisis berdasarkan instrumental serta environmental input.

II.1.2. Analisa Lingkungan Intenal

Lingkungan Internal merupakan Variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kinerja pada Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam batas-batas tertentu yang dapat dikendalikan dalam rangka mewujudkan tujuan/sasaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Selain itu, tersedianya Sumber Daya Manusia/Aparatur serta Sumber Daya Material berupa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi saat ini, meskipun masih jauh memadai, namun tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan dukungan dan motivasi kerja aparatur yang bertugas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

II.1.3. Analisa Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah salah satu Variabel yang turut mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja aparatur, akan tetapi pengelolaan atau pengendaliannya diluar kendali Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, jika faktor lingkungan eksternal ini mempunyai pengaruh atau berdampak negatif terhadap optimalisasi pencapaian kinerja aparatur maka harus dapat disiasati dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan kinerja unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan cara menyikapi desentralisasi kewenangan dalam hal pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan

Transmigrasi serta hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal Pembangunan dan secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel TC 30
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

| No. | Indikator | SPM/Stan dar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----------|---|-----------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> |
| 1 | Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian | | | | 57 | 57,1 | 57,2 | | 55 | 57,1 | 57,2 | |
| 2 | Persentase koperasi yang diawasi | | | | 42 | 42,5 | 43 | | 6,2 | 42,5 | 43 | |
| 3 | Jumlah Koperasi yang diawasi | | | | 41 | 42 | 43 | | 23 | 42 | 43 | |
| 4 | Persentase koperasi berkualitas | | | | 0 | 8,1 | 8,2 | | 0 | 8,1 | 8,2 | |
| 5 | Persentase koperasi yang dilatih | | | | 0 | 10 | 11 | | 0 | 10 | 11 | |
| 6 | Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi | | | | 0 | 120 | 120 | | 0 | 120 | 120 | |
| 7 | Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan | | | | 75 | 75,1 | 75,2 | | 0 | 75,1 | 75,2 | |
| 8 | Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan | | | | 14 | 20 | 24 | | 0 | 20 | 24 | |

| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | 10 | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> |
|-----------|---|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----|------------|------------|-----------|
| 9 | Data akurat UMKM yang terwujud | | | | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Jumlah wirausaha pemula yang tercipta | | | | 100 | 100 | 100 | | 0 | 100 | 100 | |
| 11 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM | | | | 92 | 91,9 | 91,8 | | 93 | 91,9 | 91,8 | |
| 12 | Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | | | | 5 | 5 | 5 | | 2 | 5 | 5 | |
| <i>14</i> | Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan | | | | 100 | <i>100</i> | <i>100</i> | | 33 | <i>100</i> | <i>100</i> | |
| 15 | Persentase pelaksanaan pelatihan | | | | <i>40</i> | <i>46</i> | <i>47</i> | | 33 | <i>46</i> | <i>47</i> | |
| <i>16</i> | Jumlah pencari kerja yang dilatih | | | | 500 | 500 | 500 | | 165 | 500 | 500 | |
| 17 | Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia | | | | 4 | 5 | 5 | | 1 | 5 | 5 | |
| 18 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | | | | 0 | 68,7 | 68,8 | | 0 | 68,7 | 68,8 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|----------|----------|----------|--|------|----------|----------|--|
| 19 | Persentase pemanfaatan informasi pasar kerja | | | | 0 | 10 | 30 | | 0 | 10 | 30 | |
| 20 | Banyaknya akses pada informasi pasar kerja online | | | | 0 | 300 | 700 | | 0 | 300 | 700 | |
| 21 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan | | | | 91 | 91,1 | 91,2 | | 88 | 91,1 | 91,2 | |
| 22 | Besaran pemeriksaan perusahaan | | | | 21 | 22 | 23 | | 11 | 22 | 23 | |
| 23 | Jumlah perusahaan yang didata | | | | 25 | 27 | 29 | | 22 | 27 | 29 | |
| 24 | Persentase tenaga honorer Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan | | | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 25 | Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan | | | | 4.969,00 | 5.018,00 | 5.067,00 | | 4969 | 5.018,00 | 5.067,00 | |
| 26 | Persentase Satuan permukiman yang dibina | | | | 2 | 2,1 | 2,3 | | 0 | 2,1 | 2,3 | |
| 27 | Persentase transmigran yang dibina | | | | 76,1 | 75,8 | 75,3 | | 78 | 75,8 | 75,3 | |
| 28 | jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan | | | | 0 | 50 | 50 | | 0 | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------|------|------|--|--------|------|------|--|
| 29 | jumlah sarana hunian yang dipersiapkan | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | Jumlah transmigran yang dilatih | | | 0 | 50 | 50 | | 0 | 50 | 50 | |
| 31 | Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri | | | 23,9 | 24,2 | 24,7 | | 10 | 24,2 | 24,7 | |
| 32 | persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha | | | 43 | 45 | 46 | | 22 | 45 | 46 | |
| 33 | Jumlah sarana yang dibantu | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | |
| 34 | Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah | | | 100 | 100 | 100 | | 50% | 100 | 100 | |
| 35 | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 100 | 100 | 100 | | 50% | 100 | 100 | |
| 36 | Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat | | | 3 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 3 | |
| 37 | Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | |
| 38 | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 100 | 100 | 100 | | 50,00% | 100 | 100 | |
| 39 | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | | 14 | 14 | 14 | | 8 | 14 | 14 | |
| 40 | Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan | | | 715 | 720 | 725 | | 301 | 720 | 725 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|------|-------|-------|--|-----|-------|-------|--|
| 41 | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud | | | | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100 | 100 | 100 | | 50% | 100 | 100 | |
| 43 | Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan | | | | 35 | 0 | 35 | | 0 | 0 | 35 | |
| 44 | Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya | | | | 35 | 35 | 35 | | 15 | 35 | 35 | |
| 45 | Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya | | | | 35 | 35 | 35 | | 15 | 35 | 35 | |
| 46 | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100 | 100 | 100 | | 50% | 100 | 100 | |
| 47 | Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan | | | | 37 | 37 | 37 | | 15 | 37 | 37 | |
| 48 | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | | | | 4752 | 4752 | 4752 | | 0 | 4752 | 4752 | |
| 49 | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | | | | 0 | 12500 | 12500 | | 0 | 12500 | 12500 | |
| 50 | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | | | | 389 | 389 | 389 | | 0 | 389 | 389 | |
| 51 | Jumlah hidangan tamu yang disediakan | | | | 215 | 215 | 215 | | 43 | 215 | 215 | |
| 52 | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | | | | 154 | 154 | 154 | | 93 | 154 | 154 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|
| 53 | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 100 | 100 | 100 | | 50% | 100 | 100 | |
| 54 | Jumlah kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | | | | 0 | 3 | 3 | | 0 | 3 | 3 | |
| 55 | Jumlah mebel yang diadakan | | | | 0 | 10 | 10 | | 0 | 10 | 10 | |
| 56 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | | | | 3 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 4 | |
| 57 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | | | | 2 | 3 | 3 | | 0 | 3 | 3 | |
| 58 | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | 100 | 100 | 100 | | 50% | 100 | 100 | |
| 59 | Jumlah waktu penyediaan jasa listrik | | | | 12 | 12 | 12 | | 6 | 12 | 12 | |
| 60 | Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | | | 12 | 12 | 12 | | 6 | 12 | 12 | |
| 61 | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 | 100 | 100 | | 30% | 100 | 100 | |
| 62 | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya | | | | 12 | 12 | 12 | | 6 | 12 | 12 | |
| 63 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | | | | 19 | 15 | 16 | | 3 | 15 | 16 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|----|----|----|--|---|----|----|--|
| 64 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | | | 1 | 2 | 2 | | 0 | 2 | 2 | |
| 65 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara | | | | 14 | 15 | 15 | | 2 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | |

II.3. Isu-Isu Penting Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk merumuskan isu-isu strategis dalam memproyeksikan kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats). Isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas Organisasi. Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan, agar memudahkan dalam mengorganisir isu, maka dilakukan identifikasi. Hasil identifikasi isu dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini ;

Matriks Internal Strategi Faktor Analisis Sistem

| Kekuatan (S) | Kelemahan (W) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Adanya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang➤ Adanya komitmen dan motivasi kerja yang tinggi, di kalangan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. | <ul style="list-style-type: none">➤ Jumlah Aparatur Pembina Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim.➤ Sarana Prasarana Kerja dalam rangka pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, relatif masih kurang memadai. |

Matriks Eksternal Strategi Faktor Analisis Sistem

| Peluang (O) | Ancaman (T) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Adanya Komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan stimulus bagi pelaku UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemic covid 19;.➤ Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dalam menekan tingkat pengangguran➤ Masih luasnya lahan untuk dijadikan daerah transmigrasi.➤ Adanya struktur masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan serta budaya kerja yang ulet dan religius (Megetteppa na malempu). | <ul style="list-style-type: none">➤ Ancaman krisis ekonomi global akibat pandemi covid 19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat➤ Terbatasnya daya serap Koperasi dan UMKM memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)➤ Tingginya angka PHK sebagai dampak pandemic covid 19. |

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPd.

Review terhadap rancangan awal RKPd sangat dibutuhkan dalam merumuskan perencanaan baik pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang matang dan tentunya bermamfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sistem Perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dikenal dengan adanya Perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) artinya memungkinkan menggali ide-ide dan gagasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan. Sistem perencanaan dengan metode tersebut dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Perencanaan metode dari atas kebawah (top down planning) untuk memungkinkan terjadinya perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan Keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan terjadinya proses tersebut, maka kita membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------|---|----------------|----------------------|--|------------|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| 1. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Kab Sidrap | Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian | 57,1 | 50.500.000 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Kab Sidrap | Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian | 57,1 | 24.500.000 | |
| 2. | Kegiatan :Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Kab Sidrap | Persentase koperasi yang diawasi | 42,50 | 50.500.000 | Kegiatan :Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Kab Sidrap | Persentase koperasi yang diawasi | 10 | 24.500.000 | |
| 3. | SUB KEGIATAN Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Sidrap | Jumlah Koperasi yang diawasi | 42,00 | 50.500.000 | SUB KEGIATAN Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Sidrap | Jumlah Koperasi yang diawasi | 20,00 | 24.500.000 | |
| 4. | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Kab Sidrap | Persentase koperasi berkualitas | 8,1 | 120.000.000 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Kab Sidrap | Persentase koperasi berkualitas | 5 | 12.480.000 | |
| 5 | Kegiatan : Pendidikan dan Latihan | Kab Sidrap | Persentase koperasi yang dilatih | 10,00 | 120.000.000 | Kegiatan : Pendidikan dan Latihan | Kab Sidrap | Persentase koperasi yang | 1 | 12.480.000 | 12 |

| | Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | dilatih | | | |
|-----|--|------------|---|--------|---------------|--|------------|---|-------|---------------|--|
| 6 | Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kab Sidrap | Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi | 120,00 | 120.000.000 | Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kab Sidrap | Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi | 12 | 12.480.000 | |
| 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Kab Sidrap | Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan | 75,1 | 60.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Kab Sidrap | Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan | 75,1 | 95.525.000 | |
| 8 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Kab Sidrap | Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan | 20,00 | 60.000.000 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Kab Sidrap | Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan | 20,00 | 95.525.000 | |
| 9. | Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kab Sidrap | Data akurat UMKM yang terwujud | 1,00 | 10.000.000 | Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kab Sidrap | Data akurat UMKM yang terwujud | 1,00 | 25.250.000 | |
| 9. | Sub kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kab Sidrap | Jumlah wirausaha pemula yang tercipta | 50,00 | 50.000.000 | Sub kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kab Sidrap | Jumlah wirausaha pemula yang tercipta | 50,00 | 70.275.000 | |
| 10. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Kab Sidrap | Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM | 91,90 | 2.475.000.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Kab Sidrap | Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM | 91,90 | 4.475.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|--------|---------------|--|------------|---|--------|---------------|
| 11 | Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Kab Sidrap | Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | 2,00 | 2.475.000.000 | Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Kab Sidrap | Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | 2,00 | 4.475.000.000 |
| 12 | Sub Kegiatan: Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kab Sidrap | Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | 5,00 | 2.475.000.000 | Sub Kegiatan: Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kab Sidrap | Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | 5,00 | 4.475.000.000 |
| 13 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Kab Sidrap | Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan | 100,00 | 1.214.000.000 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Kab Sidrap | Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan | 100,00 | 1.253.595.000 |
| 14 | Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Kab Sidrap | Persentase pelaksanaan pelatihan | 46,00 | 1.214.000.000 | Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Kab Sidrap | Persentase pelaksanaan pelatihan | 46,00 | 1.253.595.000 |
| 15 | Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Kab Sidrap | Jumlah pencari kerja yang dilatih | 500,00 | 537.000.000 | Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Kab Sidrap | Jumlah pencari kerja yang dilatih | 500,00 | 537.000.000 |
| 16 | Sub kegiatan: Pengadaan sarana pelatihan kerja kab/kota | Kab Sidrap | Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia | 5,00 | 677.000.000 | Sub kegiatan: Pengadaan sarana pelatihan kerja kab/kota | Kab Sidrap | Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia | 5,00 | 716.595.000 |
| 17 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Kab Sidrap | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 68,70 | 100.000.000 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Kab Sidrap | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|--------|-------------|--|------------|---|-------|---------------|----|
| 18 | Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Kab Sidrap | Persentase pemanfaatan informasi pasar kerja | 10,00 | 100.000.000 | Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Kab Sidrap | Persentase pemanfaatan informasi pasar kerja | 0 | 0 | |
| 19 | Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Kab Sidrap | Banyaknya akses pada informasi pasar kerja online | 300,00 | 100.000.000 | Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Kab Sidrap | Banyaknya akses pada informasi pasar kerja online | 0 | 0 | |
| 20 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Kab Sidrap | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan | 91,1 | 838.350.000 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Kab Sidrap | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan | 91,1 | 1.520.130.000 | |
| 21 | Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Sidrap | Besaran pemeriksaan perusahaan | 22,00 | 25.250.000 | Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Sidrap | Besaran pemeriksaan perusahaan | 22,00 | 13.130.000 | 12 |
| 22 | Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Kab Sidrap | Jumlah perusahaan yang didata | 27,00 | 25.250.000 | Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Kab Sidrap | Jumlah perusahaan yang didata | 27,00 | 13.130.000 | |
| 23 | Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Kab Sidrap | Persentase tenaga honorer Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan | 100 | 813.100.000 | Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Kab Sidrap | Persentase tenaga honorer Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan | 100 | 1.507.007.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----------|-------------|---|------------|---|----------|---------------|----|
| 24 | Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Kab Sidrap | Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan | 5.018,00 | 813.100.000 | Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Kab Sidrap | Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan | 5.018,00 | 1.507.007.000 | |
| 25 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Kab Sidrap | Persentase Satuan permukiman yang dibina | 2,10 | 407.880.000 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Kab Sidrap | Persentase Satuan permukiman yang dibina | 2,10 | 734.500.000 | |
| 26 | Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Sidrap | Persentase transmigran yang dibina | 75,80 | 407.880.000 | Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Sidrap | Persentase transmigran yang dibina | 75,80 | 734.500.000 | |
| 27 | Sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Sidrap | jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan | 50,00 | 50.000.000 | Sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Sidrap | jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan | 0 | 0 | |
| 28 | Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | Kab Sidrap | jumlah sarana hunian yang dipersiapkan | 3,00 | 307.880.000 | Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | Kab Sidrap | jumlah sarana hunian yang dipersiapkan | 3,00 | 734.500.000 | |
| 29 | Sub kegiatan: Pelatihan Transmigrasi | Kab Sidrap | Jumlah transmigran yang dilatih | 50,00 | 50.000.000 | Sub kegiatan: Pelatihan Transmigrasi | Kab Sidrap | Jumlah transmigran yang dilatih | 0 | 0 | |
| 30 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Kab Sidrap | Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri | 24,20 | 23.320.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Kab Sidrap | Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri | 24,20 | 51.000.000 | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|-------|---------------|--|------------|--|-------|---------------|
| 31 | Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | Kab Sidrap | persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha | 45,00 | 23.320.000 | Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | Kab Sidrap | persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha | 45,00 | 51.000.000 |
| 32 | Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman | Kab Sidrap | Jumlah sarana yang dibantukan | 2,00 | 23.320.000 | Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman | Kab Sidrap | Jumlah sarana yang dibantukan | 2,00 | 51.000.000 |
| 33 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab Sidrap | Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 3.951.119.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab Sidrap | Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 3.951.119.000 |
| 34 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 26.240.000 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 15.000.000 |
| 35 | Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat | 3 | 16.140.000 | Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat | 3 | 9.000.000 |
| 36 | Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat | 1 | 10.100.000 | Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat | 1 | 6.000.000 |
| 37 | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 3.191.357.000 | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 5.181.258.000 |
| 38 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Sidrap | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 14,00 | 3.168.259.000 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Sidrap | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 14,00 | 5.168.258.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|-------|-------------|--|------------|--|------|-------------|
| 39 | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab Sidrap | Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan | 720 | 14.928.000 | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab Sidrap | Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan | 720 | 8.000.000 |
| 40 | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab Sidrap | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud | 1 | 8.170.000 | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab Sidrap | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud | 1 | 5.000.000 |
| 41 | Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 20.194.000 | Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 10.000.000 |
| 42 | Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab Sidrap | Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan | - | - | Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab Sidrap | Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan | - | - |
| 43 | Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab Sidrap | Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya | 35 | 10.100.000 | Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab Sidrap | Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya | 35 | 5.000.000 |
| 44 | Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab Sidrap | Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya | 35 | 10.094.000 | Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab Sidrap | Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya | 35 | 5.000.000 |
| 45 | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 321.710.000 | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 135.300.000 |
| 46 | Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Sidrap | Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan | 37 | 1.446.000 | Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Sidrap | Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan | 37 | 1.500.000 |
| 47 | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab Sidrap | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 4.752 | 107.989.000 | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab Sidrap | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|--|--------|-------------|---|----------------------------|--|------|-------------|--|
| 48 | Sub kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kab Sidrap | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12.500 | 5.000.000 | Sub kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kab Sidrap | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 0 | 0 | |
| 49 | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab Sidrap | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | 389 | 3.514.000 | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab Sidrap | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | 389 | 1.800.000 | |
| 50 | Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu | Kab Sidrap | Jumlah hidangan tamu yang disediakan | 215 | 5.024.000 | Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu | Kab Sidrap | Jumlah hidangan tamu yang disediakan | 215 | 5.000.000 | |
| 51 | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Sidrap dan luar daerah | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 154 | 198.737.000 | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Sidrap dan luar daerah | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | 154 | 127.000.000 | |
| 52 | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 207.513.000 | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 52.500.000 | |
| 53 | Sub Kegiatan: Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | Kab Sidrap | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | 3 | 90.000.000 | Sub Kegiatan: Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | Kab Sidrap | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | 0 | 0 | |
| 54 | Sub Kegiatan: Pengadaan mebel | Kab Sidrap | Jumlah mebel yang diadakan | 10 | 50.000.000 | Sub Kegiatan: Pengadaan mebel | Kab Sidrap | Jumlah mebel yang diadakan | 10 | 7.500.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|-------|-------------|--|------------|---|-------|-------------|
| 55 | Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Sidrap | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | 4 | 50.695.000 | Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Sidrap | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | 4 | 30.000.000 |
| 56 | Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Sidrap | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | 3 | 16.818.000 | Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Sidrap | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | 3 | 15.000.000 |
| 57 | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Kab Sidrap | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | 182.283.000 | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Kab Sidrap | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | |
| 58 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Sidrap | Jumlah waktu penyediaan jasa listrik | 12,00 | 48.000.000 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Sidrap | Jumlah waktu penyediaan jasa listrik | 12,00 | 48.000.000 |
| 59 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Sidrap | Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12,00 | 134.283.000 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Sidrap | Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12,00 | 134.283.000 |
| 60 | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 115.459.000 | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab Sidrap | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 95.970.000 |
| 61 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab Sidrap | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya | 12,00 | 81.970.000 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab Sidrap | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya | 12,00 | 71.970.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-------|------------|---|------------|---|-------|------------|
| 62 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Sidrap | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 19,00 | 11.725.000 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Sidrap | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 19,00 | 8.000.000 |
| 63 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab Sidrap | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1,00 | 10.000.000 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab Sidrap | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1,00 | 10.000.000 |
| 64 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Sidrap | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara | 14,00 | 11.764.000 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Sidrap | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara | 14,00 | 6.000.000 |

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dikenal dua arah, yaitu Top Down Planning dan Bottom Up Planning, kedua Sistem tersebut sering digunakan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan untuk saling bersinergi satu dengan lainnya.

Dalam pelaksanaannya dilakukan setiap tahun sebagai penjabaran Pembangunan Lima Tahunan dan mulai dilakukan pada tingkat Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan) yang melibatkan Stakeholders, kemudian ditindaklanjuti pada tingkat kecamatan. Musrenbang tersebut kemudian dirumuskan pada tingkat Kabupaten sebagai Program Unit Kerja SKPD Tahunan, Pelaksanaan Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan dimaksudkan menampung aspirasi masyarakat sebagai pencerminan azas keadilan dan pemerataan, agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan disegala aspek secara berkesinambungan (sustainable).

Usulan Program masyarakat Desa/Kelurahan dapat kita tampung pada tingkat SKPD. Tidak semua usulan program masyarakat dapat diterima oleh karena tidak sejalan apa yang kita programkan dan terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan keterbatasan dana tersebut.

Tabel II. 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VOLUME | PAGU INDIKATIF (Rp) | CATATAN |
|-----------|--|--|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | | | | | |
| | Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | |
| 1 | Pelatihan Tata Rias Dan Tata Boga Supaya Ibu-Ibu kami Juga Punya Keahlian | Lk I Lapungrangan dan Lk II Perinyameng, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula | Jumlah pencari kerja yang dilatih | 40 orang | 60.000.000 | Hasil Musrebang tahun 2021 |
| 2 | Kursus menjahit | Lk I Lapungranga Dan Lk II Perinyameng, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula | sda | 100 orang | 150.000.000 | sda |
| 3 | Pelatihan Pembuatan Abon Ikan | Desa Bila Riase, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Bila Riase | sda | 30 orang | 45.000.000 | sda |
| 4 | Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua | sda | 30 orang | 45.000.000 | sda |
| 5 | Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | Desa Dengeng-dengeng, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Dengeng Dengeng | sda | 10 Orang | 15.000.000 | sda |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------|-------------|-----------------------------|
| 6 | Pelatihan menjahit | Desa BuaE, Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Buae | sda | 30 orang | 45.000.000 | sda |
| 7 | Pelatihan tata rias | Kelurahan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, | sda | 20 orang | 30.000.000 | sda |
| | | | | | | |
| | Program Pengembangan UMKM | | | | | |
| | Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | |
| | Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | | | | |
| | Bantuan Peralatan Produksi Bagi Kelompok UMK | Dusun I Kalosi Alau, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Kalosi Alau | Jumlah sarana yang diserahkan | 1 Paket | 50.000.000 | Hasil Musrembang tahun 2021 |
| | Bantuan Peralatan Produksi Bagi Kelompok UMK | Desa Betao Riase, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Betao Riase | sda | 1 Paket | 50.000.000 | sda |
| | Bantuan Peralatan Produksi Bagi Kelompok UMK | Buntu Buangin, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Buntu Buanging | sda | 1 Paket | 50.000.000 | sda |
| | Bantuan Peralatan Produksi Bagi Kelompok UMK | dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Lombo | sda | 1 Paket | 50.000.000 | sda |
| | bantuan perlengkapan usaha percetakan | kelurahan lalebata, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Lelebata | sda | 2 Paket | 100.000.000 | Pokir agt DPRD |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|-------------|-----------------------------|
| | Bantuan Peralatan Produksi Bagi Kelompok UMK | Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Tellu Limpoe, Seluruh Kelurahan/Desa | sda | 10 Paket | 500.000.000 | Sda |
| | Bantuan Peralatan Produksi Bagi Kelompok UMK | Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Panca Lautang, Seluruh Kelurahan/Desa | sda | 5 Paket | 250.000.000 | Sda |
| | Bantuan Peralatan Produksi Bagi Kelompok UMK | Takkalasi, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Takkalasi | sda | 1 paket | 50.000.000 | Sda |
| | Bantuan Peralatan Produksi Bagi Kelompok UMK | Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang | sda | 1 paket | 50.000.000 | Sda |
| | Bantuan Peralatan Produksi Bagi Kelompok UMK | Dua pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Dua Pitue, Seluruh Kelurahan/Desa | sda | 1 paket | 50.000.000 | Sda |
| | | | | | | |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | |
| | Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | |
| | Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi Perkoperasian | KANTOR DESA SALBUKKANG, Kab. Sidenreng Rappang, | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi | 25 orang | 25.000.000 | Hasil Musrembang tahun 2021 |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|
| | | Dua Pitue, Salobukkang | | | | |
| | Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi Perkoperasian | dusun II awotara, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Lombo | sda | 30 orang | 30.000.000 | Sda |
| | Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi Perkoperasian | Desa Bila Riase, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Bila Riase | sda | 30 orang | 30.000.000 | Pokir agt DPRD |
| | Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi Perkoperasian | (PANCARIJANG BARANTI KULO), Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa | sda | 90 orang | 90.000.000 | Sda |
| | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| | Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | | | | | |
| | Pembangunan Jembatan Salo Datu Penghubung Kabupaten Sidrap dan Wajo | Dusun 1 Lagading, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Lagading | Jumlah prasarana yang dibantukan | 20 meter | 5.100.000.000 | Hasil Musrembang tahun 2021 |
| | Peningkatan Jalan Lintas Kabupaten Jalan Poros Banga Penghubung Kab. Sidrap dan Kab. Wajo | Dusun 3 Banga, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Lagading | sda | 4 km | 5.100.000.000 | Sda |
| | Peningkatan Jalan | Dusun IV Salocallu, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Betao | sda | 3 km | 5.500.000.000 | Sda |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|----------|-------------|-----------------------------|
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| | Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | | | | | |
| | Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman | | | | | |
| | Bantuan Sarana Pada Kawasan Transmigrasi | Jumlah sarana yang dibantukan | dusun i, dusun IV, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Lombo | 30 paket | 200.000.000 | Hasil Musrembang tahun 2021 |
| | | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Lima Tahun (Jangka Menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan, yaitu APBN Awal dan APBN Perubahan. Dalam setiap penetapan APBN telah tertuang didalamnya berbagai Program lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia telah memproyeksikan program serta mengakomodir usulan-usulan dari Daerah kemudian dirumuskan menjadi Program Nasional melalui Rakornas yang dilaksanakan setiap tahun.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 adalah “Peningkatan potensi dan daya saing daerah untuk mendorong kebangkitan ekonomi”, dengan sasaran diantaranya Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumberdaya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi system ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Tujuan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Bupati dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur sebagai wujud pelaksanaan perencanaan, serta

menitikberatkan pada pemulihan ekonomi pada pelaku usaha mikro kecil menengah, koperasi; sehingga dapat mencegah peningkatan pengangguran dan memperluas area transmigrasi demi terwujudnya kesejahteraan yang merata.

a. Tujuan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
- 2) Memperluas kesempatan kerja yang layak
- 3) Mengembangkan dan memajukan kawasan transmigrasi

b. Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM
- 2) Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung investasi daerah
- 3) Meningkatnya Pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi.

c. Indikator Sasaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- 1). Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM
- 2). Tingkat penyerapan tenaga kerja.
- 3). Persentase kawasan transmigrasi yang lepas binaan.

III.3. Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2022 memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - d. Sub kegiatan Penyelenggaraan
 - e. Sub kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - 1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- C. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - 1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- D. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - a. Sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - b. Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- E. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
- F. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - a. Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi
 - b. Sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
- G. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - 1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR |
|----|--|---|
| 1 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian |
| 2 | Kegiatan :Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase koperasi yang diawasi |
| 3 | SUB KEGIATAN Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang diawasi |
| 4 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi berkualitas |
| 5 | Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang dilatih |
| 6 | Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi |
| 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan |
| 8 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan |
| 9 | Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Data akurat UMKM yang terwujud |
| 10 | Sub kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah wirausaha pemula yang tercipta |
| 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM |
| 12 | Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil |
| 13 | Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil |
| 14 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan |

| | | |
|----|--|---|
| 15 | Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase pelaksanaan pelatihan |
| 16 | Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah pencari kerja yang dilatih |
| 17 | Sub kegiatan: Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia |
| 18 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan |
| 19 | Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Besaran pemeriksaan perusahaan |
| 20 | Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah perusahaan yang didata |
| 21 | Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga honorer Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan |
| 22 | Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan |
| 23 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Satuan permukiman yang dibina |
| 24 | Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase transmigran yang dibina |
| 25 | Sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan |
| 26 | Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | jumlah sarana hunian yang dipersiapkan |
| 27 | Sub kegiatan: Pelatihan Transmigrasi | Jumlah transmigran yang dilatih |
| 28 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri |
| 29 | Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha |
| 30 | Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman | Jumlah sarana yang dibantu |
| 31 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah |
| 32 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 33 | Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat |

| | | |
|----|--|---|
| 34 | Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat |
| 35 | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 36 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN |
| 37 | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan |
| 38 | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud |
| 39 | Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 40 | Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan |
| 41 | Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya |
| 42 | Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya |
| 43 | Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 44 | Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan |
| 45 | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan |
| 46 | Sub kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan |
| 47 | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan |
| 48 | Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah hidangan tamu yang disediakan |
| 49 | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan |
| 50 | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 51 | Sub Kegiatan: Pengadaan kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | Jumlah kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan |
| 52 | Sub Kegiatan: Pengadaan mebel | Jumlah mebel yang diadakan |
| 53 | Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan |
| 54 | Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan |
| 55 | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan |
| 56 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu penyediaan jasa listrik |
| 57 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor |

| | | |
|----|--|---|
| 58 | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 59 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya |
| 60 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara |
| 61 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi |
| 62 | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu disusun rencana kerja yang memuat sejumlah program dan kegiatan. Rencana kerja ini tidak terlepas dari rencana strategis yang telah ditetapkan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dalam rencana strategis telah dipetakan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai nomenklatur dalam permenmendagri dimaksud, namun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum kami temukan keselarasannya dan telah kami usulkan untuk dibuatkan penetapan terhadap program dan kegiatan tersebut.

Untuk tahun 2022 ditetapkan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut membutuhkan anggaran sebesar **Rp 9.363.674.900**. Program, kegiatan berikut pendanaannya kami sajikan dalam Tabel C29 berikut.

Tabel T-C.29
RANCANGAN RENJA 2022
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | 9.363.674.900 | | | | 9.892.804.123 |
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian | Kab Sidrap | 57,1 | 24.500.000 | APBD KAB | | 57,2 | 24.745.000 |
| | Kegiatan :Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase koperasi yang diawasi | Kab Sidrap | 21,00 | 24.500.000 | APBD KAB | | 21,00 | 24.745.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|-------|------------|-------------|--|-------|------------|
| | SUB KEGIATAN Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang diawasi | Kab Sidrap | 20,00 | 24.500.000 | APBD KAB | | 20,00 | 24.745.000 |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi berkualitas | Kab Sidrap | 8,1 | 12.480.000 | APBD KAB | | 8,2 | 12.605.000 |
| | Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang dilatih | Kab Sidrap | 1,00 | 12.480.000 | APBD KAB | | 1,10 | 12.605.000 |
| | Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi | Kab Sidrap | 12,00 | 12.480.000 | APBD KAB | | 12,00 | 12.605.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan | Kab Sidrap | 75,1 | 94.580.000 | APBD KAB | | 75,2 | 95.525.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--------|-------------|----------|--|--------|-------------|
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan | Kab Sidrap | 20,00 | 94.580.000 | APBD KAB | | 24,00 | 95.525.000 |
| | Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Data akurat UMKM yang terwujud | Kab Sidrap | 1,00 | 44.580.000 | APBD KAB | | 1,00 | 45.525.000 |
| | Sub kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah wirausaha pemula yang tercipta | Kab Sidrap | 100,00 | 50.000.000 | APBD KAB | | 100,00 | 50.000.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM | Kab Sidrap | 91,99 | 524.000.000 | APBD KAB | | 91,90 | 529.240.000 |
| | Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | Kab Sidrap | 1,00 | 524.000.000 | APBD KAB | | 1,00 | 529.240.000 |
| | Sub Kegiatan: Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | Kab Sidrap | 2,00 | 524.000.000 | APBD KAB | | 2,00 | 529.240.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--------|---------------|----------|--|--------|---------------|
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan | Kab Sidrap | 100,00 | 718.000.000 | APBD KAB | | 100,00 | 725.180.000 |
| | Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Persentase pelaksanaan pelatihan | Kab Sidrap | 46,00 | 718.000.000 | APBD KAB | | 47,00 | 725.180.000 |
| | Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah pencari kerja yang dilatih | Kab Sidrap | 500,00 | 41.000.000 | APBD KAB | | 500,00 | 41.180.000 |
| | Sub kegiatan: Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia | Kab Sidrap | 5,00 | 677.000.000 | APBD KAB | | 5,00 | 684.000.000 |
| | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan | Kab Sidrap | 91,1 | 1.505.086.000 | APBD KAB | | 91,2 | 1.520.137.000 |
| | Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Besaran pemeriksaan perusahaan | Kab Sidrap | 22,00 | 25.000.000 | APBD KAB | | 23,00 | 25.502.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|-------|---------------|-------------|--|-------|---------------|
| | Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah perusahaan yang didata | Kab Sidrap | 27,00 | 25.000.000 | APBD KAB | | 29,00 | 25.502.000 |
| | Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga honoror Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan | Kab Sidrap | 100 | 1.480.086.000 | APBD KAB | | 100 | 1.494.635.000 |
| | Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah tenaga honoror pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan | Kab Sidrap | 5.018 | 1.480.086.000 | APBD KAB | | 5067 | 1.494.635.000 |
| | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Satuan permukiman yang dibina | Kab Sidrap | 2,10 | 734.500.000 | APBD KAB | | 2,30 | 1.091.845.000 |
| | Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase transmigran yang dibina | Kab Sidrap | 75,80 | 734.500.000 | APBD KAB | | 75,30 | 1.091.845.000 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|-------|---------------|----------|-------|---------------|
| | Sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan | Kab Sidrap | 50,00 | - | APBD KAB | 50,00 | 50.000.000 |
| | Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | jumlah sarana hunian yang dipersiapkan | Kab Sidrap | 3,00 | 684.500.000 | APBD KAB | 3,00 | 991.845.000 |
| | Sub kegiatan: Pelatihan Transmigrasi | Jumlah transmigran yang dilatih | Kab Sidrap | 50,00 | 50.000.000 | APBD KAB | 50,00 | 50.000.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri | Kab Sidrap | 24,20 | 51.000.000 | APBD KAB | 24,70 | 51.510.000 |
| | Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha | Kab Sidrap | 45,00 | 51.000.000 | APBD KAB | 46,00 | 51.510.000 |
| | Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman | Jumlah sarana yang dibantukan | Kab Sidrap | 2,00 | 51.000.000 | APBD KAB | 2,00 | 51.510.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah | Kab Sidrap | 100% | 5.699.528.900 | APBD KAB | 100% | 5.842.017.123 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------|---------------|----------|--|--------|---------------|
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Sidrap | 100% | 26.240.000 | APBD KAB | | 100% | 26.500.000 |
| | Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat | Kab Sidrap | 3 | 16.140.000 | APBD KAB | | 3 | 16.300.000 |
| | Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat | Kab Sidrap | 1 | 10.100.000 | APBD KAB | | 1 | 10.200.000 |
| | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab Sidrap | 100% | 4.683.508.900 | APBD KAB | | 100% | 4.867.999.123 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Kab Sidrap | 14,00 | 4.660.410.900 | APBD KAB | | 14,00 | 4.844.669.123 |
| | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan | Kab Sidrap | 720 | 14.928.000 | APBD KAB | | 725,00 | 15.077.000 |
| | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud | Kab Sidrap | 1 | 8.170.000 | APBD KAB | | 1,00 | 8.253.000 |
| | Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab Sidrap | 100% | 20.194.000 | APBD KAB | | 100% | 40.685.000 |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan | Kab Sidrap | - | - | APBD KAB | | 35,00 | 20.290.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--------|-------------|----------|--|--------|-------------|
| | Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya | Kab Sidrap | 35 | 10.100.000 | APBD KAB | | 35,00 | 10.200.000 |
| | Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya | Kab Sidrap | 35 | 10.094.000 | APBD KAB | | 35,00 | 10.195.000 |
| | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab Sidrap | 100% | 372.973.000 | APBD KAB | | 100% | 374.155.000 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan | Kab Sidrap | 37 | 1.446.000 | APBD KAB | | 37,00 | 1.461.000 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | Kab Sidrap | 4.752 | 107.989.000 | APBD KAB | | 4.752 | 109.069.000 |
| | Sub kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Kab Sidrap | 12.500 | 5.000.000 | APBD KAB | | 12.500 | 5.000.000 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | Kab Sidrap | 389 | 3.514.000 | APBD KAB | | 389,00 | 3.550.000 |
| | Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah hidangan tamu yang disediakan | Kab Sidrap | 215 | 5.024.000 | APBD KAB | | 215,00 | 5.075.000 |
| | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | Kab Sidrap | 154 | 250.000.000 | APBD KAB | | 154,00 | 250.000.000 |
| | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab Sidrap | 100% | 260.000.000 | APBD KAB | | 100% | 208.189.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------|-------------|-------------|--|-------|-------------|
| | Sub Kegiatan: Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan | Kab Sidrap | 3 | 90.000.000 | APBD KAB | | 3,00 | 90.000.000 |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan mebel | Jumlah mebel yang diadakan | Kab Sidrap | 10 | 50.000.000 | APBD KAB | | 10,00 | 50.000.000 |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | Kab Sidrap | 7 | 100.000.000 | APBD KAB | | 4,00 | 51.202.000 |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | Kab Sidrap | 3 | 20.000.000 | APBD KAB | | 3,00 | 16.987.000 |
| | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Kab Sidrap | 100% | 220.000.000 | APBD KAB | | 100% | 206.982.000 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu penyediaan jasa listrik | Kab Sidrap | 12 | 70.000.000 | APBD KAB | | 12,00 | 70.000.000 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Kab Sidrap | 12 | 150.000.000 | APBD KAB | | 12,00 | 136.982.000 |
| | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab Sidrap | 100% | 116.613.000 | APBD KAB | | 100% | 117.507.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|----|------------|-------------|--|-------|------------|
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya | Kab Sidrap | 12 | 82.790.000 | APBD KAB | | 12,00 | 83.617.000 |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Kab Sidrap | 15 | 11.842.000 | APBD KAB | | 16,00 | 11.690.000 |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Kab Sidrap | 2 | 10.100.000 | APBD KAB | | 2,00 | 10.200.000 |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara | Kab Sidrap | 15 | 11.881.000 | APBD KAB | | 15,00 | 12.000.000 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Referensi (Undang-Undang/Peraturan), Renstra, dan keterpaduan Top Down Planning (Konsultatif) dan Bottom Up Planning (Definitif) melalui Musrenbang dan Kebutuhan Organisasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang serta menselaraskan dan mensinergikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu mendapat perhatian khusus jika sekiranya ketersediaan anggaran cukup demi untuk pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2022.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 27 Juli 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG,

ANDI SAFARI RENATA, S.I.P.M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730306 199202 1 002

